

# JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



# JGLP

## Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta <b>Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani</b>
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) <b>Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad</b>
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan <b>Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti</b>
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo <b>Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani</b>
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal <b>Sadar</b>
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting <b>Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat</b>
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 <b>Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah</b>
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat <b>Ilham Zitri</b>
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat <b>Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius</b>
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara <b>Abdul Hakim</b>



## Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan

Anang Fajrul Ukhwaluddin<sup>1</sup>, Valina Singka Subekti<sup>2</sup>

Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Corresponding Author: anang.fajrul@ui.ac.id

---

**Keyword:**

Village head election;  
Symbolic capital;  
Social capital.

**Abstract:** This journal article discusses the occurrence of the candidacy of a husband and wife pair in the village head election that took place in Sekaran village and Lembor village. With the focus of the discussion on the causes of the candidacy of husband and wife in village head election. The results of this discussion indicate that the nomination of a husband and wife pair occurred because there were no people who were running to challenge the incumbent in the two villages. And the absence of people who nominate them, is due to the strong influence of social capital and symbolic capital owned by incumbent candidates in Sekaran village, and also the strong influence of the NU group in Lembor village.

**Kata Kunci:**

Pilkades;  
Modal simbolik;  
Modal sosial.

**Abstrak:** Artikel jurnal ini membahas mengenai terjadinya pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades yang terjadi di Desa Sekaran dan Desa Lembor. Dengan fokus pembahasan pada penyebab terjadinya pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pencalonan pasangan suami-istri terjadi disebabkan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan diri menjadi penantang petahana di dua desa tersebut. Dan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan tersebut, disebabkan kuatnya pengaruh modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh calon petahana di Desa Sekaran, dan juga kuatnya pengaruh kelompok NU yang ada di Desa Lembor.

---

### PENDAHULUAN

Proses Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Indonesia telah mengalami berbagai perbaikan baik secara sistem, aturan dan tentu secara prinsip maupun nilai-nilainya. Pilkades telah dijalankan sesuai dengan aturan tanpa mendelegitimasi kekhasan desa dan hak-hak masyarakat desa. Jika dibandingkan dengan pilkades masa Orde Baru, tentu pelaksanaan pilkades saat ini sangat berbeda. Pilkades saat ini bisa dikatakan sebagai bentuk pilkades yang paling ideal dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai dalam demokrasi. Meskipun juga harus diakui, bahwa masih banyak masalah yang menyertai proses pilkades di desa-desa di Indonesia. Masalah-masalah tersebut diantaranya.

*Pertama.* Masih banyaknya calon kepala desa yang menggunakan politik uang. Menurut Halili (2008) praktik politik uang tidak hanya terjadi dari calon ke pemilih atau melalui “serangan fajar”, tetapi juga dari calon kepada panitia penyelenggara dengan tujuan membeli surat suara untuk digunakan oleh calon kepala desa (Halili, 2009). Praktik politik uang semakin tumbuh subur dalam pilkades apalagi sejak 2014 desa telah mendapatkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Sehingga bagi sebagian calon kepala desa, biaya yang dihabiskan untuk politik uang dalam pilkades bisa dicarikan pengantinya baik melalui APBDes

atau melalui *fee* proyek pembangunan desa, yang semua tindakan tersebut adalah bentuk tindakan yang melawan hukum.

*Kedua.* Masih dominannya elite dan oligarki desa dalam pilkades atau masih suburnya hubungan *patron-klien*. Pilkades sampai saat ini masih diwarnai oleh pertarungan antar elite desa baik yang memiliki modal sosial warisan dari Orde Baru ataupun yang memiliki modal sumber daya atau memiliki dua-duanya. Yuningsih & Subekti (2016) menjelaskan pengaruh tokoh masyarakat atau elite desa (*sesepuh/kokolot*) dan *kuncen* Kampung Naga dalam memberikan restu politiknya sebagai bentuk seleksi informal untuk masyarakat yang akan mencalonkankan diri dalam pilkades di Desa Neglasari. Masyarakat yang tidak lolos seleksi tersebut otomatis tidak bisa mencalonkankan diri dalam pilkades (Yuningsih & Subekti., 2016).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2018) menjelaskan bahwa pengaruh oligarki dalam pilkades di Desa Sitimerto sangat kuat. Orang yang berstatus sebagai oligarki tersebut adalah orang tua dari salah satu calon kepala desa. Orang tua tersebut menyatakan akan mengeluarkan uang berapapun asalkan anaknya dapat terpilih sebagai kepala desa, atau dengan kata lain orang tua tersebut bersedia memberi uang kepada masyarakat melebihi uang yang diberikan calon lain dengan nominal berapapun. Proses pilkades dengan harapan memberikan hak dan kesempatan yang sama menjadi terkendala akibat dominannya pengaruh tokoh masyarakat/elite dan para oligarki desa.

Masalah yang *ketiga* yakni munculnya fenomena calon suami-istri dalam pilkades. Fenomena pilkades dengan calon pasangan suami-istri merupakan fenomena baru dalam konteks politik di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri pasal 24 ayat 2 tersebut disebutkan bahwa "Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian". Artinya jika proses pendaftaran pilkades sampai batas waktu pendaftaran telah diperpanjang dan calon yang mendaftar kurang dari 2 berarti pelaksanaan pilkades di sebuah desa harus ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Atas dasar tersebut kemudian banyak masyarakat atau calon kepala desa yang maju atau mencalonkan istrinya sebagai calon kepala desa, agar proses pelaksanaan pilkades tidak ditunda. Berdasarkan data di beberapa Provinsi di Jawa Timur menunjukkan bahwa desa-desa yang melaksanakan pilkades pada tahun 2019 dengan calon pasangan suami-istri secara kuantitatif berjumlah cukup banyak.

**Tabel 1. Daerah di Jawa Timur dengan Pilkades Calon Pasangan Suami-Istri tahun 2019**

No.	Kabupaten	Desa	Calon Pasangan Suami-Istri
1	Lamongan	385	25
2	Bojonegoro	156	7
3	Gresik	265	27
4	Jombang	280	6
5	Nganjuk	232	7
6	Tuban (Kec-Montong)	13	2

Sumber: diolah dari berbagai berita di media online (BlokTuban, 2019; Detik, 2019b, 2019a; Kompas, 2019; Radar Bojonegoro, 2019; Times Indonesia, 2019)

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pilkades dengan calon pasangan suami-istri terjadi merata di beberapa daerah di Jawa Timur dengan jumlah yang variatif. Hal tersebut kemudian perlu untuk dilihat penyebabnya, mengapa kemudian hal tersebut terjadi. Apakah karena faktor rendahnya partisipasi masyarakat atau faktor lain terkait dengan dominasi sumber daya maupun dominasi politik yang hanya dikuasai oleh segelintir elite dan kelompok yang ada di desa, atau terdapat faktor lainnya. Pembahasan mengenai penyebab terjadinya

pencalonan pasangan suami-istri pada pelaksanaan pilkades tersebut kemudian menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan dijelaskan dengan berbasis pada teori, literatur, dan juga data yang telah penulis peroleh dari lapangan.

Beberapa alasan berupa politik uang, keterlibatan elite, dan juga fenomena kontestasi sepasang suami-istri dinilai saling memiliki fenomena yang terkait satu sama lain. Belum banyak penelitian yang memperdalam bagaimana hubungan ketiga fenomena tersebut, terlebih kontestasi sepasang suami istri dalam meraih kemenangan di Pilkades dapat melengkapi ceruk penelitian mengenai demokrasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, alasan atau faktor terjadinya pencalonan suami-istri dalam pilkades di Desa Lembor Kabupaten Lamongan dan Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro. Beberapa faktor yang dapat menentukan terhadap pencalonan menjadi aspek penting untuk dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga lebih dalam mencoba untuk mengetahui penyebab, alasan atau faktor kemenangan suami (petahana) di Desa Lembor Kabupaten Lamongan dan kekalahan suami (petahana) di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kasus (*case study*). Maxfield mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Selain itu tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas di atas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).

Penelitian ini dilaksanakan di dua desa, Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Sampel pada penelitian kualitatif disebut disebut informan atau subyek penelitian, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan penelitian (Kriyantono, 2009). Dalam penelitian ini subyek penelitiannya yaitu Kepala Desa Terpilih, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Tim Sukses Calon Kepala Desa dan Masyarakat.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dengan menggunakan pertanyaan baku. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara seorang terwawancara dengan lainnya (Moleong, 2012). Selain wawancara juga dilakukan pengumpulan data berupa observasi, pengumpulan dokumen dan informasi audiovisual yang tidak bertumpu pada satu sumber (Creswell, 2016). Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak memerlukan sampling melainkan langsung menentukan setting penelitian yaitu berupa lokasi, aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor dan akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan terakhir yakni proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian) (Creswell, 2016).

### **HASIL DAN DISKUSI**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2019) mengenai pilkades suami-istri telah memberikan dua kesimpulan gambaran mengenai alasan suami mengajak istrinya untuk berkontestasi dalam pilkades. Pertama, dengan memilih istrinya tidak ada biaya untuk kompensasi dan tidak ada kekhawatiran tentang konflik kepentingan dikemudian hari pasca pemilihan. Dan yang ke dua, yakni dengan menjadikan istri sebagai penantang, maka peluang untuk menang bagi suami lebih besar. Penelitian di atas menurut penulis masih terdapat kekosongan yang belum diuraikan, atau dengan kata lain masih terdapat pertanyaan mendasar

yang perlu untuk dijelaskan yakni mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ajakan suami atau majunya istrinya dalam pilkades merupakan respon yang disebabkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat lainnya untuk mencalonkan diri pada pilkades. Pertanyaannya kemudian mengapa masyarakat tidak bersedia atau tidak mau mencalonkan.

Pada beberapa literatur dijelaskan mengenai berbagai dinamika politik yang terjadi di desa, termasuk permasalahan dalam politik desa yang kemudian sangat erat kaitannya yang menyebabkan munculnya pencalonan suami-istri pada pilkades. Padahal dalam semangat demokratisasi desa yang salah satu wujudnya yakni pilkades, secara tidak langsung mendorong warga untuk berpartisipasi dalam setiap gelaran pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Seperti yang dijelaskan oleh Yuningsih & Subekti (2016) yang menjelaskan aktivitas pemilihan kepala desa dengan dilatar belakangi berbagai tipologi pedesaan seperti desa tradisional (desa neglasari), transisional (desa cimekar), dan modern (desa cipacing).

Ada pun identifikasi desa tradisional ialah bertempat di desa neglasari dengan beberapa alasan seperti adanya kampung adat naga, manajemen pemerintahan belum terselenggara baik, dan desa tersebut dinilai belum mandiri dalam urusan rumah tangga sendiri. Sementara desa transisional diidentifikasi dengan desa cimekar yang terletak di daerah perbatasan antara kabupaten bandung, kota bandung, dan kabupaten sumedang. Dan identifikasi desa yang bersifat modern terletak pada desa cipacing yang berkarakter desa industri. Terdapat enam industri besar yang berskala nasional dan internasional yang berlokasi di desa tersebut. Pilkades yang diselenggarakan di ketiga desa tersebut dinilai telah memenuhi sebagian kriteria ideal dari demokrasi. Terdapat dua kriteria yang berlaku pada ketiga desa tersebut yakni kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda. Sementara itu, tiga kriteria lainnya yakni kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum sepenuhnya tercapai Yuningsih & Subekti (2016). Salah satunya yakni keterlibatan elite desa atau yang disebut kuncen dalam menyeleksi nama-nama yang berhak mencalonkan diri pada pilkades di desa neglasari.

Dinamika pemilihan kepala desa selalu dicirikan dengan adanya eksploitasi sumber daya materil yang kemudian diterjemahkan sebagai bentuk pembelian suara seperti dalam literatur Aspinal & Rohman (2017) dan Hidayat et al. (2018). Aspinal & Rohman (2017) menjelaskan adanya keterlibatan struktur negara yang memengaruhi individu dalam konteks pemilihan kepala desa. Individu dalam hal ini dimaksudkan sebagai elit pedesaan yang maju sebagai kontestan pada pemilihan kepala desa di jawa tengah. Lebih lanjut literatur ini menjelaskan bentuk patronase proyek pemerintahan terhadap desa dan klientalisme dengan bentuk jejaring antara desa dan negara. Aspinal & Rohman (2017) juga menjelaskan terdapat fenomena pemberian suara yang terjadi pada pemilihan kepala desa. Pembelian suara terjadi dilakukan oleh para elit desa dalam beberapa metode kampanyenya. Di samping itu, hubungan desa dan negara juga mengindikasikan adanya dukungan politik melalui proyek pemerintahan desa.

Aspinal & Rohman (2017) menjelaskan bahwa otoritas negara dalam hal ini pemerintahan daerah memainkan perannya secara tidak langsung. Peran tidak langsung mereka cukup besar - dengan memutuskan desa atau individu mana yang akan dipilih dengan proyek atau sumber daya lainnya. Namun peran tidak langsungnya ini juga merupakan hal yang krusial yang mampu menentukan hasil suara pemilihan kepala desa. Pejabat desa dengan konektivitasnya terhadap pemerintahan daerah memiliki posisi potensial untuk mencari proyek dan sumber daya lain untuk mengembangkan desa mereka dan meningkatkan kondisi materi dan politik mereka sendiri. Selain itu, tidak hanya desa yang membutuhkan aparat negara dalam pemerintahan daerah, namun adanya hubungan timbal balik yang dimana aparat tersebut juga membutuhkan mitra di desa untuk mencapai kekuasaan dan patronase.

Sementara itu Hidayat et al. (2018) menjelaskan fenomena serupa bahwasannya ada aspek sumber daya material masih dominan dalam hal dinamika politik desa di sitimero. Adanya politik uang yang terjadi saat pemilihan kepala desa juga dinilai cukup memengaruhi suara pemilih desa dengan maknanya yang beragam; 1) sebagai rezeki, 2) ongkos datang ke tempat pemilihan, 3) bentuk keseriusan calon di pilkades, dan 4) sebagai uang rakyat. Dominasi oligarki desa yang memiliki sumber daya materil terbilang lebih mudah untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Dalam literatur ini oligark haji mul yang mengutus putranya adit berhasil

memenangkan pemilihan kepala desa. Selepas menguasai sumber daya material, sumber daya non-material menjadi upaya selanjutnya yang identik dengan sumber kekuasaan menurut budaya jawa yakni '*kesakten*' untuk memengaruhi pemilih desa dengan pendekatan kultural.

Dua literatur sebelumnya menjelaskan terkait pengaruh aspek sumber daya material pada pemilihan kepala desa. Berbeda dengan Hidayat (2019) yang menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat dua sumber daya efektif sebagai strategi pemenangan pada gelaran pemilihan kepala desa tanjung. Kedua sumber daya efektif tersebut terdiri dari sumber daya material dan sumber daya spiritual. Kendati kekayaan merupakan salah satu syarat bagi seorang pemimpin desa tanjung, namun itu bukan menjadi hal satu-satunya sumber kekuasaan bahkan faktor dominan pada gelaran pemilihan kepala desa. Meskipun memberikan uang dengan nominal kecil, namun para pemilih lebih cenderung tertuju pada tingkah laku yang bersifat kekuasaan spiritual jawa dari pada membeli suara.

Hidayat (2019) menjelaskan terkait strategi budaya jawa yang memengaruhi pada kontestasi pemilihan kepala desa di desa tanjung, kecamatan pagu, kabupaten kediri. Literatur ini menjelaskan seluruh calon dalam pemilihan kepala desa tanjung, kecamatan pagu, kabupaten kediri memiliki strategi pendekatan budaya jawa yang didasari pada beberapa bentuk pendekatan spiritual seperti upacara slametan di makam pendiri desa, meminta doa dan lainnya yang berasal dari kiai dan dukun, kepemilikan pusaka, pulung sebagai tanda kekuasaan, petungan dengan sistem penanggalan jawa, dan aliran luri kepala desa.

Dari penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan terkait dua hal yang kemudian mempengaruhi proses politik pencalonan pada pilkades yang terjadi di beberapa desa. Pertama, yakni terkait dengan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ke dua, yakni pada kondisi struktur sosial politik yang ada di masyarakat.

### **Pengaruh Modal**

Teori modal dari Pierre Bourdieu berkaitan erat dengan kekuasaan. Bagi Bourdieu modal menjadi instrumen penting bagi individu untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan politiknya (Harker et al., 2009). Bourdieu melihat modal dalam berbagai macam; modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal simbolik (Halim, 2014). Modal ekonomi diartikan sebagai sumber daya produksi. Dengan kata lain bahwa sumber daya ekonomi merupakan sumber daya yang mampu untuk dikonversikan ke dalam bentuk modal lainnya baik barang maupun non-barang dan modal ekonomi juga mudah digunakan untuk segala tujuan (Halim, 2014). Dalam konteks pilkades modal ekonomi bisa jadi menjadi penggerak tim untuk bekerja atau sebagai modal awal untuk mengenalkan calon kepada pemilih atau masyarakat melalui berbagai alat peraga. Selain itu modal ekonomi juga dapat menjadi modal untuk kemudian melakukan tindakan memberi uang kepada pemilih tentu dengan tujuan agar terpilih.

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk kedudukan sosial (Halim, 2014). Dengan kata lain modal sosial lebih pada sesuatu yang tidak keliatan karena menyangkut hubungan antar individu atau antar calon dengan tokoh atau elite atau dengan organisasi kemasyarakatan. Modal sosial juga bisa diartikan sebagai bentuk jaringan sosial, ketika calon memiliki banyak relasi dengan berbagai kalangan baik individu perseorangan atau kelompok dan mereka mampu menjadi bagian kolektif untuk mendukung maka kondisi tersebut merupakan salah satu modal penting dalam proses kontestasi.

Modal kultural merupakan semua kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal, non-formal dan warisan keluarga seperti kepemilikan benda bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian hasil pendidikan formal atau sertifikat, ijazah dan non-akademik (Halim, 2014). Modal kultural sederhananya diartikan sebagai representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika dan estetika (Halim, 2014). Modal kultural hampir sama dengan modal sosial karena menekankan pada aspek nilai-nilai yang ada pada diri calon atau hasil

dari pengembangan kemampuan calon seperti contoh kemampuan dalam menghadapi dan mengendalikan massa, kemampuan memimpin dan kemampuan *lobbiying*.

Sedangkan modal simbolik merupakan sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik, seperti jabatan, mobil mewah, status atau keturunan. Dengan kata lain modal simbolik diartikan sebagai sebuah pengakuan oleh individu, kelompok formal maupun non-formal, yang akhirnya akan mampu mengkonstruksi realitas, mengiring individu untuk mengakui dan mempercayai terhadap individu atau calon (Halim, 2014). Bagi individu yang akan mengajukan diri menjadi calon pejabat publik maka hal tersebut sangat penting dalam mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Hal ini terlihat dari banyaknya elite atau politisi yang kemudian melanjutkan studi atau meminta gelar-gelar akademik sebagai bagian dari legitimasi modal kultural untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

Uraian dan penjelasan mengenai teori modal dari Bourdieu di atas tersebut dapat dijadikan instrumen untuk menganalisa, menjelaskan dan memprediksi mengenai pencalonan dan keterpilihan calon dalam kontestasi, termasuk pilkades. Bagi calon yang ikut kontestasi baik dalam pemilihan umum tingkat desa sampai nasional tentu tujuan utamanya adalah untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Untuk itu calon membutuhkan modal sebagai instrumen untuk dikenal, untuk disukai dan untuk dipilih. Sehingga salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis pencalonan dan keterpilihan individu atau calon yakni dengan menganalisis modal yang dimiliki.

Dari yang disampaikan oleh Bourdieu tersebut di atas dapat dihubungkan dengan data yang ada. Pada pelaksanaan pilkades di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat betapa dominannya pengaruh modal yang dimiliki oleh calon petahana, sehingga mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang berani untuk mencalonkan diri pada pilkades tahun 2019. Di Desa Sekaran selama bertahun-tahun dipimpin oleh kepala desa dari keluarga yang sama, yakni dari keluarga besar Bambang Harnowo. Bahkan menurut Supriyadi keluarga dari Bambang telah berkuasa di Desa Sekaran sejak berpuluh-puluh tahun.

“sudah sejak berpuluh-puluh tahun itu yang menjadi kepala desa selalu keluarganya pak Bambang, mereka keluarga besar mas”.<sup>1</sup>

Selain Supriyadi, Farokhah juga mengkonfirmasi mengenai keluarga besar dari Bambang.

“ya keluarganya Pak Bambang itu banyak mas, terus di tengah-tengah masyarakat ya terkenal (terpandang), mbah mbahnya dulu, jadi sudah sama sama tahu sudah sama sama kenal. Apalagi kepala desa sebelumnya yang lama itu ya pamannya pak Bambang”.<sup>2</sup>

Modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh Bambang seperti yang disebutkan di atas juga dikonfirmasi oleh Zaini.

“sumber daya saja. Kalau persaingan antar daerah itu tidak ada. Faktor sumber daya saja. Di sini banyak sumber daya yang pandai cukup, di sana faktor keluarga kuat. Jadi posisi keluarga secara kuantitatif kuat. Nah kalau di sini dari segi kualitatif kuat itu saja yang jadi persoalan. Cuma ya memenangkan secara politik kan kualitatif kan itu yang penting memungkinkan itu. Jadi kalau persaingan antar daerah tidak. Jadi ya karena di sini banyak orang yang secara kualifikasi cukup, di sana di tempat keluarganya pak Bambang itu kuantitatif yang kuat jadi masih ada elektabilitas yang tinggi”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Supriyadi Masyarakat Desa Sekaran.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Farokhah Ketua Muslimat Desa Sekaran.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Zaini Kepala Dusun Sekaran Desa Sekaran.

Selain menyampaikan bahwa jumlah keluarga Bambang yang cukup besar di salah satu dusun di Desa Sekaran. Zaini juga menyampaikan mengenai kekuatan dari Khunafah, istri dari Bambang itu sendiri. Apalagi Zaini juga merupakan salah satu keluarga dari Khunafah.

“iya dari luar jadi ayahnya itu kan kawin ke Palang tapi saudara ayahnya di sini ada 7 atau 8. Iya saudara ayahnya keluarganya di sini cukup banyak”.<sup>4</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Zaini tersebut menegaskan mengenai pengaruh dari ke dua keluarga besar, baik yang berasal dari keluarga Bambang Harnowo maupun yang dari keluarga Khunafah. Modal merupakan instrumen penting bagi individu atau masyarakat yang ingin meraih atau pun mempertahankan kekuasaan. Bagi Bambang Harnowo dan keluarganya, dengan modal sosial hubungan kekeluargaan yang begitu besar sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, Bambang juga memiliki modal lain yakni modal simbolik, dengan garis keturunan pada kepala desa-kepala desa sebelumnya yang telah puluhan tahun berkuasa di Desa Sekaran menjadi modal bagi Bambang untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Modal-modal yang dimiliki Bambang tersebut terbukti sangat berpengaruh di Desa Sekaran. Pengaruh tersebut tidak hanya pada aspek politik atau lebih sempit pada pilkades. Lebih dari itu dalam pengisian pos-pos perangkat desa dan juga jabatan kepala dusun juga diisi oleh keluarga dari Bambang dan istrinya. Seperti yang disampaikan oleh Supriyadi.

“seng sak anak e, saiki dadi sak omah 2 perangkat, seng carik e bojone mbak yu ne bu khunafah dadi sak keluarga lak pie. Terus pak kasun Zaini iku yo keluargae bu Khunafah”<sup>5</sup>

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pengaruh dari keluarga besar Bambang di Desa Sekaran sangat besar. Bahkan dalam beberapa kesempatan masyarakat kemudian menyebutnya dengan sebutan keluarga kerajaan. Besarnya modal yang dimiliki oleh satu individu atau dengan kata lain besarnya modal yang telah dimiliki oleh salah satu keluarga, apalagi telah mendominasi dan berpengaruh begitu lama dalam politik desa tentu berakibat terhadap keikutsertaan atau partisipasi masyarakat pada agenda-agenda politik, termasuk pilkades. Hal tersebut yang kemudian mendorong munculnya pilkades dengan calon pasangan suami-istri.

### **Pengaruh Kelompok Masyarakat**

Masyarakat desa di Jawa dapat diidentifikasi seperti apa yang disampaikan oleh Clifford Geertz (2014). Geertz melakukan pembagian masyarakat desa di Jawa berdasarkan kepercayaan agama, preferensi ideologis dan ideologi politik masyarakat, yang kemudian menghasilkan tiga tipe kebudayaan masyarakat yakni, *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Geertz menegaskan bahwa dalam masyarakat Jawa terdapat tiga tipe kebudayaan, yaitu *abangan*, *santri* dan *priyayi*. Menurutnya:

“Abangan yang mewakili sikap yang menitikberatkan pada segi-segi sinkretisme Jawa yang menyeluruh dan secara luas berhubungan dengan unsur-unsur petani di antara penduduk; santri yang mewakili sikap yang menitikberatkan pada segi-segi Islam dalam sinkretisme tersebut yang pada umumnya berhubungan dengan unsur pedagang (maupun juga dengan unsur-unsur tertentu di antara petani); dan priyayi yang sikapnya menitikberatkan pada segi-segi Hindu dan berhubungan dengan unsur-unsur birokrasi.”

---

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Wawancara dengan Supriyadi Masyarakat Desa Sekaran.

Pada struktur sosialnya, *abangan* adalah kelompok yang sebagian besar adalah para petani yang tinggal di pedesaan. Varian *abangan* ini secara umum diasosiasikan dengan masyarakat pedesaan di Jawa. Hal ini dikaitkan dengan tradisi masyarakat soal slametan dan ritual. Tradisi ini berkembang pada kultur masyarakat agraris dengan tujuan untuk perjamuan lingkungan agar selamat. Adapun, *santri* juga dimaksudkan pada persoalan ritual pokok keagamaan Islam seperti kewajiban salat lima kali sehari, salat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Artinya, dalam menjalankan peribadatan agama Islam, kalangan *santri* tidak mencampur adukkan unsur-unsur lain selain agama Islam seperti kalangan *abangan*. Geertz juga membagi varian *santri* menjadi dua kategori: *santri modernis* dan *tradisionalis*. Kalangan *santri* juga teridentifikasi sebagai kelompok yang sebagian besar para pedagang yang tinggal di pasar. Sementara itu, pada kelompok *priyayi*, teridentifikasi sebagai kelompok yang menempati birokrasi pemerintah. Kelompok ini cenderung berbeda dari klasifikasi sebelumnya karena varian *priyayi* terasosiasi sebagai kelompok kelas sosial dibandingkan dengan persoalan religiusitas.

Pada kasus yang terjadi di Desa Lembor. Pelaksanaan pilkades dengan calon pasangan suami-istri sangat dominan dipengaruhi oleh kondisi struktur sosial politik masyarakatnya. Meskipun hal tersebut telah berubah dari apa yang disampaikan oleh Geertz seperti di atas. Di Desa Lembor masyarakat terbagi menjadi dua kelompok atau arus besar yakni pada kelompok NU dan Muhammadiyah, atau dalam identifikasi Geertz disebut dengan istilah *santri tradisionalis* dan *santri modern*. Dua kelompok atau dua arus besar tersebut yang kemudian saling berkontestasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pilkades. Bagi masyarakat untuk maju sebagai calon kepala desa harus mendapatkan dukungan dari NU atau Muhammadiyah. Apalagi ke dua kelompok tersebut secara terbuka menyampaikan terlibat dalam proses-proses politik yang ada di Desa Lembor, termasuk pada proses pencalonan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh H. M. Naim calon kepala desa petahana.

“iya, dan pencalonan kepala desa di sini itu agak unik, bukan mencalonkan atas keinginan pribadi. Biasanya ormas yang mendorong (mencalonkan). Jadi secara tidak langsung ada rekomendasi. Biasanya para tokoh kumpul-kumpul, lalu musyawarah, siapa yang akan kita dorong (calonkan) untuk maju. Jadi tidak ada dominasi pribadi dari dulu. Saya juga dulu seperti itu, saya dari awal agak, dulu kan saya terjun di pendidikan dan NU. Karena di minta tokoh-tokoh masyarakat hasil musyawarah itu akhirnya saya daftar. Yang ke dua kemarin juga seperti itu prosesnya”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan yang di atas dapat dilihat bahwa NU telah terlibat secara aktif untuk menentukan dan memutuskan individu atau masyarakat dari kadernya yang akan dicalonkan pada pilkades di Desa Lembor. Dengan mekanisme internal yang diikuti oleh tokoh-tokoh NU dan tentu para pengurus NU Ranting Desa Lembor. Pencalonan H. M. Naim oleh NU merupakan bentuk dari sikap organisasi NU dalam proses kontestasi politik yang terjadi di Desa Lembor. Hal tersebut juga secara langsung disampaikan oleh Parsiadi.

“iya musyawarah diinternal. Yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, sejak dulu ya termasuk saya dulu. Jadi silahkan ini sudah dinilai kinerjanya sudah bagus, membuktikan pengabdianya kepada organisasi dan masyarakat, sekarang desa membutuhkan. Ya seperti itu, awal-wal itu seperti itu sejak dulu seperti itu. Zaman mulai pak darto, setelah pak Darto pak Hari, dan pak Naim”.<sup>7</sup>

Disampaikan oleh Parsiadi bahwa sejak dulu NU di Desa Lembor selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap organisasi terkait dengan siapa nama-nama yang memenuhi syarat untuk dicalonkan. Lebih lanjut Parsiadi juga menjelaskan bahwa NU juga memiliki mekanisme

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan H. M. Naim Calon Kepala Desa Petahan (suami).

<sup>7</sup> Wawancara dengan Parsiadi Ketua Ranting NU Desa Lembor.

sendiri untuk melihat penilaian masyarakat terhadap nama yang akan dicalonkan atau diajukan oleh NU dalam setiap kontestasi.

“jadi dulu itu ada, bahkan sudah kita tanamkan politik ya, kita politik kita juga menggunakan sistem bandul. Jadi sistem bandul itu kita lempar nama-nama dari NU untuk dinilai oleh masyarakat yang kemudian nanti kita musyawarahkan diinternal”.<sup>8</sup>

Sistem bandul yang disampaikan oleh Parsiadi merupakan bentuk atau mekanisme NU untuk melihat penilaian masyarakat terhadap kader NU yang akan dicalonkan pada pilkades, sebelum nantinya diputuskan melalui musyawarah oleh kalangan NU struktural. Penggunaan sistem tersebut telah dilakukan sejak lama, bahkan sejak orde baru seperti yang telah disampaikan oleh Parsiadi bahwa keterlibatan atau pengaruh NU dan penggunaan sistem bandul dalam setiap kontestasi tersebut telah dilakukan sejak era kepemimpinan kepala desa Sudarto. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Ranting NU Desa Lembor tersebut juga diakui oleh Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Lembor.

“dan memang istilahnya orang NU itu ditargetlah, punya urutanlah dari ini, setelah ini, setelah ini, begitu. Tidak boleh bersaing, kalau dua duanya dari NU tidak mungkin”.<sup>9</sup>

Sartam melihat dan mengakui bahwa dalam setiap proses pilkades yang terjadi di Desa Lembor, NU telah mempersiapkan kader-kadernya untuk ikut serta. Tetapi tidak boleh ada persaingan di antara kader NU. Bagi Sartam hal tersebut akan sangat tidak mungkin, walaupun mungkin itu karena ada sebagian kader NU kultural yang menginisiasi untuk tetap mencalonkan diri dalam pilkades. Tetapi lebih lanjut Sartam menyatakan kader NU tidak berani dan tidak mungkin bersaing dengan nama yang sudah ada, dalam hal ini H. M. Naim.

“memang ngga ada, karena situasinya politik di Desa Lembor khususnya ya, kalau kader-kader pak Naim kan dari Nahdliyin kan. Nah, kader-kadernya Nahdliyin tidak berani untuk menyaingi pak Naim”.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades di Desa Lembor tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial politik yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak berani mencalonkan diri disebabkan ada peran dari kelompok keagamaan yang ada. Bahkan seperti yang telah disampaikan di atas bahwa jangan sampai terjadi pertarungan atau kontestasi antar kader baik dari NU maupun Muhammadiyah.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades yang terjadi di desa-desa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh modal dan pengaruh kelompok masyarakat yang ada di Desa. Seperti yang terjadi di Desa Sekaran, modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh keluarga Bambang Harnowo sangat mendominasi dan berpengaruh, yang mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang berani untuk mencalonkan diri pada pilkades Desa Sekaran 2019. Sedangkan yang terjadi di Desa Lembor dipengaruhi oleh kekuatan kelompok keagamaan NU dan Muhammadiyah, yang telah sama-sama terlibat aktif dalam proses politik, termasuk pilkades. Bahkan, NU secara terbuka mengakui memiliki mekanisme untuk menentukan kadernya yang layak untuk dicalonkan dan tidak menginginkan adanya pertarungan

---

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sartam Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Lembor.

<sup>10</sup> Ibid.,

di antara kader NU. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan diri pada pilkades, sehingga pelaksanaan pilkades kemudian diikuti oleh pasangan suami-istri.

## REFERENSI

- Aspinal, E., & Rohman, N. (2017). Village Head Election in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52.
- Astuti, P., Sulistiyowati, & Astrika, L. (2019). Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1).
- Bloktuban. (2019). *Suami Istri di Dua Desa Kecamatan Montong Berebut Kursi Kades*. Bloktuban.Com. <https://bloktuban.com/2019/07/10/suami-istri-di-dua-desa-kecamatan-montong-berebut-kursi-kades/?m=0>
- Creswell, J. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. PUSTAKA PELAJAR.
- Detik. (2019a). *50 Pasangan Suami Istri "Bertarung" di Pilkades Lamongan*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4615376/50-pasangan-suami-istri-bertarung-di-pilkades-lamongan>
- Detik. (2019b). *Unik, Pasutri Hingga Bapak Anak Saling Jegal di Pilkades Nganjuk*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4425205/unik-pasutri-hingga-bapak-anak-saling-jegal-di-pilkades-nganjuk>
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Halili. (2009). Pola Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14(2).
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikanya*. LP2B.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *(Habitus x Modal) + Ranah= Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jalasutra.
- Hidayat, E. (2019). Proses Demokrasi Desa dan Strategi Pemenangan Berbasis Budaya Jawa di Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 22(1), 2019. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 22(1).
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). Praktik Politik oligarki dan Mobilisasi Sumberdaya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimento Pada Tahun 2016. *Jurnal Sospol*, 4(2).
- Kompas. (2019). *Pasangan Suami Istri hingga Saudara Kandung Bersaing di Pilkades*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/10493491/pasangan-suami-istri-hingga-saudara-kandung-bersaing-di-pilkades>
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Radar Bojonegoro. (2019). *Pilkades Dinasti 7 Desa Cakades Pasutri*. JawaPos.Com. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/06/26/143178/Pilkades-dinasti-7-desa-cakades-pasutri>
- Times Indonesia. (2019). *Hari Ini, 286 Desa di Jombang Gelar Pesta Demokrasi*. Times Indonesia. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/237604/hari-ini-286-desa-di-jombang-gelar-pesta-demokrasi>

Yuningsih, N. Y., & Subekti., V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik UI*, 1(2).